

KOLABORASI MULTI-STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PONTIANAK

Oleh :

Yulius Yohanes¹

Hijrah Akbar² Hangga Taqwa Reza³

Nesya Putri Salsabila⁴ Tri Teguh Mulyono⁵

Alamat Email: yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id¹ hijrahakbar111@gmail.com²

1. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Abstrak

Pengelolaan sampah di Kota Pontianak menjadi isu krusial seiring dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inovasi, tantangan seperti infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi multi-stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam menghadapi permasalahan sampah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah bergantung pada struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, tata kelola yang baik, pembagian informasi, dan akses terhadap sumber daya. Kolaborasi yang efektif diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak.

Kata kunci: kolaborasi; pengelolaan sampah; Pontianak; multi-stakeholder.

Abstract

Waste management in Pontianak City has become a crucial issue amid rapid population growth and urbanization. Although the government has implemented various innovations, challenges such as inadequate infrastructure and a lack of public awareness remain obstacles. This research aims to analyze multi-stakeholder collaboration, including government, community, and private sector involvement, in addressing waste problems. Using a qualitative approach, data was collected through interviews and observations. The findings indicate that the success of waste management depends on network structure, commitment to common goals, good governance, information sharing, and access to resources. Effective collaboration is expected to provide sustainable solutions for waste management in Pontianak City.

Keywords: collaboration; waste management; Pontianak; multi-stakeholder.

A. Pendahuluan

Sampah di era sekarang menjadi masalah yang terus-menerus dibahas. Berbagai solusi yang diajukan pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, dan sering kali solusi tersebut ditolak oleh masyarakat. Situasi ini membuat persoalan sampah semakin kompleks, baik dari perspektif sosial maupun lingkungan. Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi isu yang semakin krusial seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang terus berlangsung. Dengan populasi yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, volume sampah yang dihasilkan meningkat secara signifikan, diperkirakan mencapai 68 juta ton per tahun. Namun, hanya sekitar 15% dari total sampah yang dikelola dengan baik.

Menurut R.H. Pramudito (2021), terdapat beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah, yaitu Ketidacukupan Infrastruktur, Kurangnya kesadaran masyarakat dan fragmentasi dalam kebijakan. Sedangkan menurut Kardono (2007:631) berpendapat bahwa

permasalahan pengelolaan sampah dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang belum optimal, infrastruktur yang kurang memadai, tingkat daur ulang yang rendah.

Kota Pontianak, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi. Pertambahan jumlah penduduk ini berkontribusi pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Pengelolaan sampah yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kota.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal, fasilitas publik, dan berbagai layanan juga ikut meningkat. Kegiatan sehari-hari, seperti makan dan menggunakan berbagai barang, menghasilkan beragam jenis sampah. Apabila sampah-sampah tersebut tidak ditangani dengan baik, maka akan menumpuk dan menimbulkan berbagai masalah serius, seperti pencemaran lingkungan serta risiko kesehatan bagi

masyarakat.

Dalam hal ini bukti nyata padatnya jumlah penduduk di Kota Pontianak berpengaruh terhadap volume sampah di Kota Pontianak.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kota Pontianak

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Pontianak (Jiwa)
	2024
Pontianak Selatan	91.290
Pontianak Tenggara	49.176
Pontianak Timur	110.904
Pontianak Barat	150.517
Pontianak Kota	123.867
Pontianak Utara	149.714
Jumlah	675.468

Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2024

Berdasarkan table tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk Kota Pontianak dari 6 Kecamatan yaitu berjumlah 675.468 jiwa. Tentu hal ini menjadi faktor utama peningkatan volume sampah di Kota Pontianak.

Dalam rentang waktu 2 tahun terakhir, yaitu 2023 hingga 2024. Volume sampah di Kota Pontianak pada tahun 2023 menunjukkan

kenaikan dari sekitar 406,76 ton/hari (*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2023*) dan untuk di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 411,96 ton/hari (*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2024*).

Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta dampak kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu cara yang efektif adalah melalui kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Permasalahan sampah di Kota Pontianak tidak hanya berdimensi teknis operasional, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan. Pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan hidup, gangguan kesehatan masyarakat, serta penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Kondisi ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya

penyelesaiannya.

Pemerintah Kota Pontianak yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, sudah banyak mengeluarkan inovasi-inovasi di 10 tahun terakhir dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak, seperti Layanan jemput bola pengangkutan sampah, Bank Sampah, Pengelolaan sampah organik dan nonorganik di TPST 3R, Transformasi TPA Batu Layang ke Sanitary Landfill, Pengurangan penggunaan sampah plastik, serta digitalisasi pengelolaan sampah. Namun, inovasi-inovasi tersebut belum optimal karena keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta masih belum penuh. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dan menggunakan layanan digital masih terbatas, sementara dukungan swasta dan integrasi kelembagaan perlu diperkuat. Selain itu, transformasi TPA dan pengolahan sampah modern masih menghadapi kendala teknis dan sosial. Dengan kolaborasi yang lebih erat dan edukasi berkelanjutan, inovasi ini berpotensi menjadi solusi efektif dalam mengelola sampah secara berkelanjutan di Pontianak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tentang kolaborasi

multi-stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak menjadi relevan dan urgent. Dengan kolaborasi yang lebih erat dan edukasi berkelanjutan, inovasi-inovasi yang telah dikembangkan pemerintah Kota Pontianak berpotensi menjadi solusi efektif dalam mengelola sampah secara berkelanjutan di Kota Pontianak. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Teori “*Collaborative Governance*” yang dikemukakan oleh Deseve, Edward. (2009). Ada 8 indikator keberhasilan kolaboratif governance yang dikemukakan oleh De Save, yaitu : (1) *Network Structure* (2) *Commitment to common purpose* (3) *Trust among the participants* (4) *Governance* (5) *Access to authority* (6) *Distributive accountability/responsibility* (7) *Information sharing* (8) *Access to resource*

Dalam penelitian ini akan mengadaptasi indikator keberhasilan yang dikemukakan oleh Deseve Edward. (2009). namun dengan memfokuskan pada *Network Structure*, *Commitment To Common Purpose*,

Governance, Information Sharing Dan Access To Resources dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pontianak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif atau *descriptive research* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta serta keterangan-keterangan yang ada di lapangan.

Penentuan informan tersebut sudah sesuai kaidah teknik purposive sampling dimana orang-orang tersebut dianggap paling mengetahui mengenai informasi penting dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada argumen bahwa Kota Pontianak merupakan salah satu daerah dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Informan yang dipilih tentunya sudah mewakili unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.

Informan tersebut antara lain :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah BDinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
3. Bank Kalbar
4. Hotel Aston Pontianak
5. Kelompok Swadaya Masyarakat

Langkah-langkah penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Data yang didapatkan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis interaktif Miles Huberman.
3. Setelah data dianalisis selanjutnya dilakukan validasi data dengan triangulasi sumber

C. Hasil Penelitian & Pembahasan

Pada dasarnya *Collaborative Governance* merupakan suatu paradigma dalam administrasi publik, istilah *governance* ini muncul menggantikan *government* dalam paradigma *Old Public Administration* dan paradigma *New Public*

Management. Pada era saat ini *collaborative governance* telah menjadi fenomena dalam tata kelola pemerintahan.

Collaborative governance ini dalam praktiknya melibatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pengelolaan pemerintahan. Kolaborasi yang dilakukan dimaksudkan agar terciptanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola urusan pemerintahan, karena untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* tidak bisa dilakukan oleh satu aktor saja namun membutuhkan bantuan pihak lain dalam bentuk kolaborasi untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Dalam Penelitian terdahulu milik Hidayanti (2020) menggunakan teori dari Desave untuk menilai pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta dan dapat diketahui bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut belum efektif. Kemudian juga ada penelitian Dita (2024) yang mengkaji *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam

pengelolaan sampah di tempat tersebut sudah cukup baik dimana sebagian besar indikator yang dikemukakan oleh Desave sudah terpenuhi.

Dalam pengelolaannya, pengelolaan sampah di Kota Pontianak telah melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya yang dapat dibingkai menjadi pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Keunggulan pengelolaan sampah di Kota Pontianak yakni sistem pengelolaan yang terintegrasi mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) dikelola dengan baik, mampu mengolah sampah organik menjadi biogas, biodigester, kompos, dan maggot. Jadwal pembuangan dan pengangkutan sampah yang teratur juga membuat kota tetap bersih dan mengurangi penumpukan sampah. Selain itu, pemerintah aktif memberikan edukasi serta insentif agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Atas dasar kondisi diatas maka penelitian *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kota Pontianak menarik untuk analisis agar

mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan sampah di Kota Pontianak.

1. *Network structure*

Menurut De Save, struktur jaringan merupakan deskripsi konseptual dari hubungan satu elemen dengan elemen lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan elemen fisik dari jaringan yang ditangani. Kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Pontianak telah dilakukan dengan mencakup tiga elemen yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Stakeholder tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kolaborasi pengelolaan sampah yang ada. Dinas sebagai regulator, masyarakat sebagai aktor, dan Pihak Swasta sebagai badan yang membantu secara tidak langsung dari segi morel dan materiel pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Semua pihak dan lembaga yang berkolaborasi ini melakukan pertanggung jawaban dengan versinya masing-masing. Pihak-pihak tersebut memberikan laporan atas pertanggung jawabannya kepada Dinas Lingkungan Hidup, namun hanya sekedar untung memberi tembusan, tidak ada intervensi dari hasil laporan tersebut.

2. *Commitment to common purpose*

Commitment to a common purpose menjelaskan bahwa di dalam menjelaskan *collaborative governance* harus ada komitmen diantara para stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Komitmen menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan dan keberlanjutan suatu program atau kegiatan karena dengan adanya komitmen yang baik maka akan terjadi konsistensi dan akan berdampak pada keberlanjutan suatu program.

Komitmen yang dimiliki oleh para stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah sudah menunjukkan hal yang baik, semua pihak berkomitmen dalam pengelolaan sampah sesuai porsinya masing-masing. Pemerintah Kota Pontianak juga terus berkomitmen untuk selalu mengembangkan pengelolaan sampah yang baik, terus berinovasi, melakukan perbaikan atau pengadaan sumber daya, memperluas kerja sama dengan pihak lain agar tercapai tujuan pengelolaan sampah.

Kelompok swadaya masyarakat juga dalam perannya sebagai aktor yang mendukung pengelolaan sampah dan terus berkomitmen untuk menjalan

tugas yang dimilikinya agar sampah semaksimal mungkin terolah. Kemudian untuk pihak swasta juga berkomitmen dalam mendukung program pengelolaan sampah sebagai bagian dari dukungan terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Kota Pontianak.

Dengan adanya komitmen yang dimiliki setiap pihak yang berkolaborasi maka pencapaian tujuan akan semakin mudah untuk dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Pontianak adalah dampak dari komitmen yang dimiliki oleh para pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah.

3. *Governance*

Dalam indikator *governance*, Desave menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program kolaborasi harus menekankan kepada kejelasan tata kelola program kolaborasi yang akan dijalankan. Meliputi kejelasan siapa saja anggota dalam pelaksanaan dari teori *collaborative governance*, kejelasan informasi dan kejelasan dalam pertanggungjawaban.

Indikator *governance* pengelolaan sampah di Kota Pontianak diukur melalui prinsip akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi. Dalam penerapannya semua pihak melakukan atau melaporkan pertanggungjawaban kegiatannya. Mereka juga terbuka dengan segala kegiatan yang mereka lakukan yang sudah tertuang dalam laporan pertanggungjawaban yang berisi berbagai informasi di dalamnya. Kemudian untuk partisipasi, sudah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak, unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sudah terlibat dalam urusan ini.

4. *Information Sharing*

Dalam indikator berbagi informasi, Desave (2009) menyatakan bahwa program kolaborasi harus memastikan informasi mengenai program tersebut dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak di luar lembaga yang ikut terlibat. Namun lebih dari itu, dalam prakteknya juga terdapat penyampaian atau *sharing* informasi antar stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak sebagai sarana menyampaikan pendapat di dalam forum. Dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan sampah di Kota Pontianak dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan langsung

dilakukan dengan sosialisasi dan musyawarah dalam forum kemudian pendekatan secara tidak langsung melalui media sosial yang dimiliki.

Jika dilihat dari indikator *information sharing* yang menekankan pada penyebaran informasi kepada pihak lain, maka kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Pontianak dapat dikatakan sudah memenuhi indikator tersebut karena informasi dapat diakses oleh masyarakat baik melalui interaksi langsung dalam sosialisasi dan musyawarah atau melalui platform media sosial. Kondisi *information sharing* yang sudah baik akan berdampak pada pengelolaan sampah. Masyarakat dapat memaknai dan mendapat edukasi bagaimana pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Lebih dari itu, *information sharing* juga dapat menjadi salah satu jalan untuk promosi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Kota Pontianak. Selain itu forum yang digunakan untuk berbagi informasi juga dapat memperlancar komunikasi stakeholder, evaluasi kegiatan serta respon yang cepat. Dengan begitu pengelolaan sampah akan berjalan secara dinamis dan optimal.

5. Acces to Resources

Pada indikator akses terhadap sumber daya, Desave (2009) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya sangat penting sebagai penunjang pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga manusia, dana, serta fasilitas dan infrastruktur. Seluruh aktivitas yang dijalankan memerlukan sumber daya tersebut guna memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, dalam konteks ini adalah pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Kota Pontianak sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaannya. Tenaga manusia berperan sebagai penggerak utama kegiatan, sedangkan sumber daya finansial digunakan untuk membiayai operasional. Selain itu, sarana dan prasarana juga dibutuhkan untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Saat ini, sumber daya yang tersedia untuk pengelolaan sampah sudah tergolong memadai meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, masih dibutuhkan penambahan jumlah sumber daya manusia. Sumber daya finansial yang telah dialokasikan

melalui dana APBD Kota Pontianak sesuai dengan porsinya masing-masing, sementara stakeholder lain juga dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peranturan perundang-undangan. Untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah, Kota Pontianak telah memiliki berbagai fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pengelolaan Sampah 3R yang dibangun oleh pemerintah sebagai upaya mempercepat penyelesaian masalah sampah, termasuk pengadaan mesin-mesin pengolah sampah dan fasilitas angkutan. Namun, semua itu memerlukan proses pengembangan lebih lanjut. Meskipun pengelolaan sampah di Kota Pontianak sudah menggunakan teknologi mesin modern, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana, baik dari segi peralatan maupun tempat pengelolaan sampah dan sumber daya manusia, masih kurang memadai.

Berdasarkan penelitian, indikator keberhasilan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak meliputi struktur jaringan (*network structure*), komitmen terhadap tujuan

bersama (*commitment to common purpose*), tata kelola (*governance*), akses terhadap sumber daya (*access to resource*), dan informasi (*information sharing*). Indikator-indikator ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang ingin mengadopsi pendekatan pengelolaan sampah di Kota Pontianak khususnya dengan model tata kelola kolaboratif.

D. Simpulan

Pengelolaan sampah di Kota Pontianak dengan pendekatan *collaborative governance* telah berjalan secara optimal, yang dapat dilihat dari beberapa indikator menurut teori Desave sebagai berikut:

1. Network Structure

Struktur jaringan dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak tergolong kuat, baik dari sisi kolaborasi maupun sinergi antar pihak. Hal ini membuat pengelolaan sampah berjalan dengan efektif dan efisien, serta mempercepat tercapainya target zero waste to landfill.

2. Commitment to Common Purpose

Komitmen yang dimiliki oleh para stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah yang sudah menunjukkan hal yang baik,

semua pihak berkomitmen dalam pengelolaan sampah sesuai porsinya masing-masing. Pemerintah Kota Pontianak juga terus berkomitmen untuk selalu dapat mengembangkan pengelolaan sampah yang baik, terus berinovasi, melakukan perbaikan atau pengadaan sumber daya, memperluas kerja sama dengan pihak lain agar tercapai tujuan pengelolaan sampah.

3. *Governance*

Praktik tata kelola dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik, ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif. Hal ini mendukung manajemen pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

4. *Information Sharing*

Proses berbagi informasi dalam pengelolaan sampah sangat intensif, dengan penyampaian informasi melalui berbagai media kepada berbagai pihak. Ini tidak hanya meningkatkan edukasi dan pengetahuan para pemangku kepentingan, tetapi juga masyarakat luas.

5. *Acces to Resource*

Ketersediaan sumber daya berupa tenaga manusia, dana, serta sarana dan prasarana sangat penting untuk kelancaran dan keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Meskipun saat ini sumber daya yang ada sudah cukup memadai dan didukung oleh fasilitas modern seperti TPST dan TPS 3R, masih diperlukan penambahan tenaga manusia serta pengembangan sarana dan prasarana agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Dengan indikator-indikator tersebut, pengelolaan sampah di Kota Pontianak menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan tata kelola kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan.

Referensi

Buku:

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso.

Buku kumpulan artikel:

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.

Deseve, Edward. (2009). *Integration and Innovation in the Intelligence Community : The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social*

Networks. Washington DC : Ash Institute for Democratic Governance and Innovation Harvard University

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An integrative framework for collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.

Kardono, 2007. *Integrated solid waste management in Indonesian*. *Proceedings of International Symposium on EcoTopia Science 2007*, ISETS07: 629 – 633

Pramudito, R.H. (2021). *Sampah: Sebuah Perjuangan*. Jakarta: Gramedia

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. (2023). ResearchGate Publication.

Dokumen resmi:

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Kolaborasi, tantangan riset penanganan sampah di Indonesia*. Jakarta: BRIN.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Jakarta: KLHK.

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Dhakidae, D. (1991). *The State, The Rise of Capital and the fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesia News Industry*. Disertasi PhD tidak diterbitkan, Ithaca, New York: Cornell University.

Suwannathat-Pian, K. (2004, 5-7 Februari). *Question of Identity of the Muslims in Southern Thailand, A Comparative Examination of Responses of the Sam-Sams in Satun and of the Thai Malay Muslim in the Three Provinces of Yala, Narathiwat, and Pattani to Thailand's Quest for National Identity*. Paper presented at the A Plural Peninsula: Historical Interaction among the Thai, Malays, Chinese and Others, Nakhon Si Thammarat.

Internet (artikel dalam jurnal online):

Fostering community-led waste management through dynamic governance: A case study of Batam City. (2024). *Jurnal Bina Praja*.

Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. (2023). ResearchGate Publication.